

**PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN  
KETERAMPILAN FUNGSIONAL PADA PENDIDIKAN KESETARAAN  
PROGRAM PAKET B UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN  
WARGA BELAJAR**

**SYARIF HIDAYAT**  
*syarif.hidayat@yahoo.co.id*

**Program Studi Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Singaperbangsa Karawang**  
*Jl. H. S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang, Jawa Barat*

*Diterima: Agustus 2019; Disetujui: Desember 2019; Diterbitkan: Maret 2020*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to obtain a model for developing functional learning in increasing the independence of learning citizens. This research uses research and development methods with qualitative and quantitative approaches. Data is collected through interviews, observations, questionnaires, documentation studies, and group discussions. The research subjects were managers, tutors, and citizens learning equality education in the package B program at PKBM Al-Salaam and PKBM Citra Purwakarta. To determine the effectiveness of the model, the data is processed using the two difference test average. The results of the study showed that the independence of the citizens learning the Equivalence Program Package B that used the functional skills learning model was higher than those who did not use the functional skills learning model. In connection with this in the effort to reconstruct equality education, it is recommended that in the equality education program package B with the application of functional skills that are able to increase the independence of learning citizens, emphasizing efforts to diversify teaching materials, media, and learning strategies that are more in line with the independence of learning citizens.*

*Keywords: Functional Skills, Equality Education, Learning Citizens*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model pengembangan pembelajaran keterampilan fungsional dalam meningkatkan kemandirian warga belajar. Penelitian ini menggunakan metode riset dan pengembangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok. Subjek penelitian adalah pengelola, tutor, dan warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al-Salaam dan PKBM Citra Purwakarta. Untuk mengetahui efektifitas model, data diolah dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional. Sehubungan itu dalam upaya merekonstruksi pendidikan kesetaraan, merekomendasikan bahwa pada program pendidikan kesetaraan paket B dengan penerapan keterampilan fungsional yang mampu meningkatkan kemandirian warga belajar, menekankan pada upaya diversifikasi bahan ajar, media, serta strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan pembentukan kemandirian warga belajar.

**Kata Kunci:** Keterampilan Fungsional, Pendidikan Kesetaraan, Warga Belajar

## PENDAHULUAN

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu bentuk lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola oleh berbagai kelompok masyarakat. Ada yang dikelola perorangan, perusahaan, lembaga kursus, pesantren, LSM maupun masyarakat lainnya. Kegiatan yang dilakukan PKBM tidak hanya menampung kegiatan yang dirancang oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga menampung kegiatan dari sektor lain yang terkait. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal sesungguhnya berbasis pada kebutuhan belajar. (Ditjen PLS, 2004).

Secara teknis pengurus PKBM masih ada yang ditangani dan dikelola aparat/pejabat setempat. Pelaksanaannya masih dinilai berdasarkan jumlah dan prestasi pejabat melahirkan PKBM dan bukan dari keberhasilan masyarakat untuk mandiri. Namun demikian sekecil apa pun usaha untuk pemberdayaan masyarakat, pasti akan membekas. Tentu saja asal tetap sama-sama dipahami bahwa semua orang itu guru sekaligus murid dalam sekolah alam raya yang maha luas (Media Indonesia, 2006).

Dalam kenyataan PKBM masih dihadapkan pada permasalahan internal dan eksternal (Balitbang Depdiknas dan Universitas Pendidikan Indonesia, 2006). Permasalahan internal, antara lain kurangnya motivasi warga belajar, keberadaan tutor belum berperan secara maksimal, kesulitan mencari lokasi PKBM yang memiliki sarana memadai, pelaksanaan program dan proses pembelajaran belum sesuai dengan tuntutan. Permasalahan eksternal, terlihat belum adanya suatu pola kerjasama yang simultan antara PKBM dengan dunia usaha (asosiasi), perbankan/BPR dan usaha kecil menengah setempat. Implikasinya adalah belum berjalannya kemitraan, kurikulum atau materi yang disampaikan kepada warga belajar sering berjangka pendek, temporer dan musiman. Kondisi program seperti ini, berdampak pada kesungguhan warga belajar dan para lulusannya dalam mengembangkan keterampilan, maupun meneruskannya dalam bentuk usaha keterampilan bermatapencaharian.

Arah baru dan perspektif masyarakat dalam bentuk tingginya partisipasi melalui PKBM, dihadapkan pada persoalan dilematis berkenaan dengan rendahnya kapabilitas dan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan PKBM itu sendiri. Persoalan ini terungkap, dari hasil kajian beberapa data kasus PKBM yang kecenderungannya belum merujuk pada pemenuhan standar minimal manajemen yang telah diluncurkan Depdiknas. Salah satu contoh, program minimal yang harus dikelola oleh sebuah PKBM adalah tiga jenis satuan pendidikan nonformal, dari hasil kajian dokumen (daftar PKBM) di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat masih terdapat PKBM yang hanya menyelenggarakan satu atau dua satuan pendidikan nonformal.

Salah satu kajian yang relevan, hasil identifikasi yang dilaksanakan Yayasan Swadamas masyarakat bekerjasama dengan antara Kemendikbud dan UNESCO terhadap layanan pendidikan melalui Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tahun 2001, diperoleh informasi bahwa permasalahannya berkisar pada pengelolaan dan pengendalian mutu kelembagaan. Hal tersebut terjadi karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan manajerial pengelola, penyelenggara program dan tenaga kependidikan, serta lemahnya partisipasi komponen terkait di luar lembaga, sehingga kurang optimalnya mekanisme penyelenggaraan pendidikan khususnya pengelolaan pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket B yang menjadi topik permasalahan utama dalam penelitian. Argumen tersebut menjadi alasan mengapa PKBM dijadikan latar pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan program Paket B untuk peningkatan kemandirian warga belajar.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan: (1) bagaimana profil pembelajaran keterampilan fungsional pendidikan kesetaraan program paket B yang diselenggarakan PKBM? (2) bagaimana model konseptual pembelajaran keterampilan fungsional yang dapat meningkatkan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B yang diselenggarakan PKBM? Dan (3) Bagaimana implementasi model pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan program paket B dalam meningkatkan kemandirian warga belajar di PKBM dan bagaimana efektivitasnya? Penelitian

dimaksudkan untuk menemukan model pendidikan kesetaraan yang efektif dalam meningkatkan kemandirian warga belajar, dengan tujuan:

1. Mengetahui kondisi objektif pembelajaran keterampilan fungsional dalam pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM.
2. Menyusun model konseptual pembelajaran keterampilan fungsional pendidikan kesetaraan program paket B dalam meningkatkan kemandirian warga belajar di PKBM.
3. Mengetahui implementasi dan efektivitas model pembelajaran keterampilan fungsional pendidikan kesetaraan program paket B dalam meningkatkan kemandirian warga belajar di PKBM.

## **METODE PENELITIAN**

Data penelitian diperoleh berdasarkan survei dengan menggunakan perangkat instrumen berupa kuesioner, wawancara, observasi, dan tes terhadap sampel yang dipilih. Selanjutnya data tersebut dijadikan dasar untuk mendeskripsikan karakteristik serta menaksir hubungan antarvariabel dalam populasi. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan strategi komparatif (Santrock, 1977: 56). Disain penelitian yang digunakan adalah *cross sectional survey* (Shaugnessy dan Zechmeister, 1994: 129; Lerner dan Hultsch, 1983: 25) dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian difokuskan pada pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al-Salaam dan PKBM Citra Kabupaten Purwakarta. Untuk pengembangan model, digunakan prosedur riset dan pengembangan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara sinergis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian diantaranya:

1. Penelitian pendahuluan untuk mengkaji kerangka konseptual model, pada tahap ini dilakukan kegiatan penelitian melalui; mengumpulkan informasi, termasuk membaca literatur, mengobservasi kelompok belajar, dan menyiapkan laporan tentang kebutuhan pengembangan.

2. Penyusunan model konseptual berupa penyusunan format model awal, instrumen-instrumen yang akan digunakan, penyusunan modul dan materi yang akan dijadikan materi *treatment*, kriteria-kriteria untuk mengukur keefektifan model.
3. Validasi model dengan para praktisi memperoleh masukan dalam aspek operasional model serta kemungkinan-kemungkinan hambatan operasionalisasi model.
4. Merevisi model konseptual berdasarkan masukan, saran-saran, kritik, komentar dari para ahli dan para praktisi baik dalam aspek akademik dan operasional model.
5. Melakukan uji coba yang diawali dengan Diklat Tutor dengan melibatkan subjek pada PKBM Al Salaam melalui penelitian tindakan dan eksperimen.
6. Penyusunan laporan secara naratif terhadap model dan bagian-bagian yang masih “kasar” dapat diperhalus, sehingga model tersebut secara naratif akan lebih halus.
7. Merumuskan rekomendasi untuk implementasi.

Kegiatan penelitian ditempuh melalui dua tahap, yaitu: *Pertama* tahap identifikasi dan pengembangan *blueprint* model pembelajaran keterampilan fungsional yang mencakup; pengembangan rencana pembelajaran, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, kondisi tutor (tenaga pendidik), kondisi sarana prasarana, daya dukung biaya pembelajaran dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah yang ditempuh pada tahap ini adalah: (1) analisis teoritis tentang model pendidikan Kesetaraan fungsional, (2) analisis lingkungan masyarakat yang terlibat sebagai warga belajar, melalui *assessment*, (3) identifikasi daya dukung penyelenggaraan pembelajaran keterampilan fungsional yang dikembangkan, (4) identifikasi permasalahan lapangan yang relevan dan (5) mengembangkan prototipe kegiatan pembelajaran dan daya dukung lainnya.

Setelah diperoleh prototipe model pembelajaran keterampilan fungsional dengan dukungan faktor-faktor lainnya, selanjutnya dilakukan; (6) penyempurnaan pelaksanaan pembelajaran; (7) mengadakan pelatihan bagi para

tutor yang terlibat dalam kolaborasi penelitian; (8) uji coba pelaksanaan pembelajaran, dan (9) penyempurnaan penyelenggaraan pembelajaran keterampilan fungsional.

Tahap *kedua* penyempurnaan model pembelajaran dengan mengevaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen model pembelajaran yang dikembangkan. Kegiatan ini difokuskan untuk mengungkap efektivitas semua komponen pembelajaran yang dikembangkan, mengungkap karakteristik utama tentang model pembelajaran keterampilan fungsional yang berpotensi dalam meningkatkan kemandirian warga belajar, mengungkap respons dan kinerja warga belajar sebagai hasil dari model pembelajaran yang dikembangkan, serta mengungkap prinsip-prinsip dasar yang menjamin terlaksananya pembelajaran berkualitas untuk meningkatkan kemandirian warga belajar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Objektif Pembelajaran Keterampilan Fungsional

Secara ringkas, pelaksanaan proses pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan program Paket B di PKBM wilayah Kabupaten Purwakarta dilihat dari unsur warga belajar, tutor, proses pembelajaran, tujuan pembelajaran, media belajar, kurikulum, alat evaluasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Unsur	Kondisi Objektif
Warga Belajar	Warga belajar sebelumnya tidak mendapatkan pembelajaran secara konseptual tentang pendidikan kecakapan hidup, biasanya langsung luluh dengan praktek keterampilannya
	Kemampuan awal warga belajar dari konsep masih rendah
	Pengalaman warga belajar dalam bidang keterampilan berwirausaha belum tumbuh
	Minat dan kebutuhan belajar belum nampak
Tutor	Tutor belum memiliki pemahaman terhadap substansi materi pendidikan
	Cara mengajar tutor masih bersifat klasikal dan lebih dominan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran
	Setiap pelaksanaan pembelajaran tutor belum terbiasa menyusun rencana pembelajaran, media belajar, dan alat evaluasi pembelajaran
Proses	Proses pembelajaran lebih cenderung pada pendekatan instruksional

Unsur	Kondisi Objektif
Pembelajaran	dibandingkan pendekatan pribadi
	Lebih menekankan pada penuntasan penyampaian materi dan mengabaikan kebutuhan pribadi warga belajar
Tujuan Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran pada tahap awal hanya mengacu pada kemampuan WB agar bisa lulus dalam ujian paket B dan mereka mempunyai ijazah
Media Belajar	Minimnya media pendukung pembelajaran yang disusun oleh tutor pada setiap proses pembelajaran
	Kurang memanfaatkan media lokal untuk mendukung proses belajar
Bahan Belajar	Belum adanya bahan belajar untuk mengembangkan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan yang disusun oleh pihak tutor/secara lokal ataupun nasional
	Bahan belajar yang dikembangkan masih bersifat konvensional
Kurikulum	Kemampuan tutor untuk menterjemahkan kurikulum dalam praktik pembelajaran masih sangat kurang dan beragam
	Kurikulum yang ada belum menyentuh pengembangan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan warga belajar sehingga lulusan program kurang memiliki kemandirian
Alat Evaluasi	Evaluasi yang telah disusun oleh Dinas dan lembaga terkait masih terbatas pada uji kemampuan penguasaan kompetensi akademik sehingga belum memberikan informasi tentang kemandirian warga belajar

## 2. Model Konseptual Pembelajaran Keterampilan Fungsional yang Dikembangkan

Model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar, berdasarkan pada landasan konseptual, landasan yuridis, landasan empirik. Hal ini dianggap penting karena suatu model selain harus memiliki pijakan teori yang kokoh dan didasarkan pengalaman empirik yang teruji, juga harus berada pada koridor dan rambu-rambu hukum yang memayunginya. Semua itu telah dipenuhi dalam pengembangan model yang dikembangkan pada pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al-Salam Kabupaten Purwakarta.

Landasan konseptual yang dijadikan pijakan dalam pengembangan model adalah keterampilan fungsional (*life skills*) dan konsep kemandirian. Pemilihan landasan konseptual seperti itu dipandang cukup mendasar dan komprehensif untuk pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar. Berkenaan dengan landasan yuridis sebagai payung hukum dan kebijakan yang menjadi legalitas dan akuntabilitas



pada tingkat implementasi model yang disusun adalah UUD 1945, UU Nomor 20 tahun 2003 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajar Dikdas 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dan Kepmen Diknas tentang pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Wajar Dikdas 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Model yang disusun telah disesuaikan dengan rambu-rambu yang ada dalam payung hukum tersebut. Dengan demikian, model yang dikembangkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan pada umumnya dan pendidikan kesetaraan program paket B pada khususnya.

Selain berlandaskan acuan konseptual dan yuridis, model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al-Salaam Kabupaten Purwakarta juga dilandaskan pada temuan empirik berupa hasil penelitian tahap pendahuluan mengenai informasi atau data yang diperlukan dari masyarakat sekitar dan kelompok sasaran. Kondisi riil pembelajaran sebagaimana diungkapkan dalam bagian awal hasil penelitian dijadikan pijakan dalam pengembangan model. Dengan demikian model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar, selain kokoh secara konseptual dan yuridis juga memiliki feasibilitas dan adaptabilitas yang tinggi untuk diaplikasikan dalam praktik pembelajaran nyata di lapangan.

Tujuan umum Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket B adalah untuk memberikan pendidikan setara SMP/MTs, agar dapat memiliki pengetahuan akademik dan penguasaan keterampilan praktis yang dapat dijadikan bekal dimasa depan. Secara khusus, tujuan pembelajaran program paket B adalah: (1) Membantu menurunkan jumlah putus sekolah/*drop out* jenjang SMP/MTs; (2) Melaksanakan pembelajaran keterampilan fungsional berbasis keunggulan potensi lokal; (3) Memberdayakan PKBM untuk berpartisipasi membantu mengurangi jumlah putus sekolah/ *drop out* jenjang SMP/MTs; (4) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga belajar, agar mereka dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari; (5) Memberdayakan tenaga lokal yang potensial untuk



mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya; (6) Meningkatkan kemandirian warga belajar melalui pembinaan watak kewirausahaan.

Model yang dikembangkan dalam implementasinya dimaksudkan untuk mendukung: *Pertama*, penguatan dalam hal perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dan penyediaan bahan ajar. *Kedua*, penguatan dalam hal kemampuan dan kompetensi tutor yang mendukung pengembangan keterampilan fungsional, sarana-prasarana, biaya pembelajaran, model evaluasi yang ditekankan pada uji kompetensi dan dampak pembelajaran. Kedua hal ini secara terintegrasi memperhatikan kondisi warga belajar terutama, minat dan kebutuhan, kemampuan awal dan tujuan akhir dari proses pembelajaran keterampilan yakni peningkatan kemandirian warga belajar. *Ketiga*, penguatan dalam hal materi pembelajaran terutama materi yang bersifat pengantar dan konsep tentang keterampilan bermatapencarian yang diajarkan dalam kelas, sedangkan untuk kegiatan praktiknya langsung di lapangan atau bengkel kerja di bawah pengawasan langsung para tutor. Pelajaran Etika Bekerja, Ekonomi Lokal, dan Mental Kewirausahaan diajarkan di dalam kelas melalui *experiential learning*.

Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1) Kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia; (2) Kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kepribadian; (3) Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Kelompok mata pelajaran Estetika; dan (5) Kelompok mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Isi kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi 10 mata pelajaran yang keluasannya dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Ke-10 mata pelajaran tersebut meliputi: Pendidikan Agama; Pendidikan Kewarganegaraan; Bahasa; Matematika, Ilmu, Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; Keterampilan/Kejuruan; Muatan Lokal. Selain itu pada kurikulum program Paket B, mengembangkan kecakapan hidup yang terdiri atas: kecakapan pribadi, kecakapan intelektual, kecakapan sosial dan kecakapan vokasional. Pada

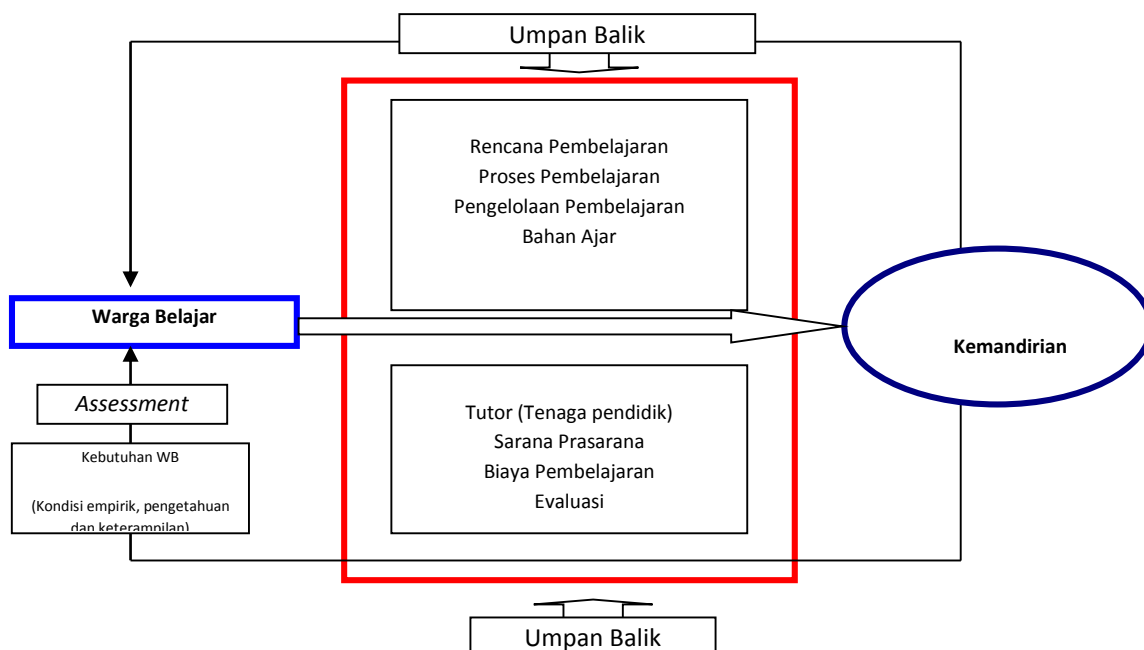
akhir pembelajaran mereka berhak mengikuti ujian nasional kesetaraan SMP/MTs.

Sebagai kekhasan model ini, dalam pembelajaran dimasukkan materi khusus untuk membina karakter kemandirian psikologis dan sikap mental kewirausahaan. Materi ini bersifat suplemen namun diberlakukan sama pentingnya dengan materi lain yang ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan demikian, lulusan Paket B yang menggunakan model ini akan lebih mandiri dibanding lulusan Paket B yang menggunakan model pembelajaran lainnya.

Fasilitator atau tutor diangkat dari kalangan masyarakat di lingkungan warga belajar. Tutor terlebih dahulu dilatih agar memahami program pembelajaran keterampilan fungsional dan memiliki kemampuan dalam bidangnya serta agar mereka paham akan metodologi dan strategi belajar, mampu menyusun rencana pembelajaran, memiliki motivasi untuk membelajarkan orang lain. Dengan demikian, tutor yang menerapkan model pembelajaran keterampilan fungsional untuk peningkatan kemandirian warga belajar pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al-Salaam Kabupaten Purwakarta lebih kompeten dibandingkan dengan yang lain, khususnya dalam membangun sikap mental dan karakter kemandirian warga belajar.

Metode pembelajaran menggunakan metode pembelajaran partisipatif dengan teknik pembelajaran yang digunakan adalah kelompok kecil, curah pendapat, diskusi kelompok, simulasi, permainan, demonstrasi, kerja kelompok dan praktek kerja (magang). Dengan cara ini pembelajaran lebih bervariasi dan responsif terhadap keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan warga belajar secara individual. Bahan belajar yang dikembangkan berasal dari warga belajar sendiri, lingkungan dan pihak penyelenggara. Sumber dan bahan belajar yang digunakan antara lain: buku, gambar, peta, diagram, alat simulasi hitung dan sumber lain. Selain itu, bahan dan sumber belajar juga dibuat dan dikembangkan bersama antara tutor dan warga belajar dengan memanfaatkan potensi lokal atau potensi alam yang ada di sekitar mereka, sehingga hambatan belajar dan miskonsepsi akan dapat diminimalisasikan.

Evaluasi model dilakukan dua kali yaitu pada awal dan akhir semester yang ditujukan untuk mengungkap kualitas pelaksanaan pembelajaran keterampilan fungsional dan kemandirian warga belajar. Pada awal semester dilakukan pengukuran kemandirian warga belajar sebagai *pretest* dan pada akhir semester juga dilakukan pengukuran ulang sebagai *post test*. Pengukuran kemandirian ini dilakukan pada *kelompok eksperimen* maupun *kelompok kontrol*. Hasil pengukuran kemandirian dijadikan dasar dalam uji efektivitas model. Sementara itu kualitas pelaksanaan pembelajaran keterampilan fungsional hanya diungkap di akhir semester setelah warga belajar mengalami proses pembelajaran keterampilan fungsional. Model awal pembelajaran Keterampilan Fungsional pada pendidikan kesetaraan Program Paket B digambarkan dalam Gambar 1.

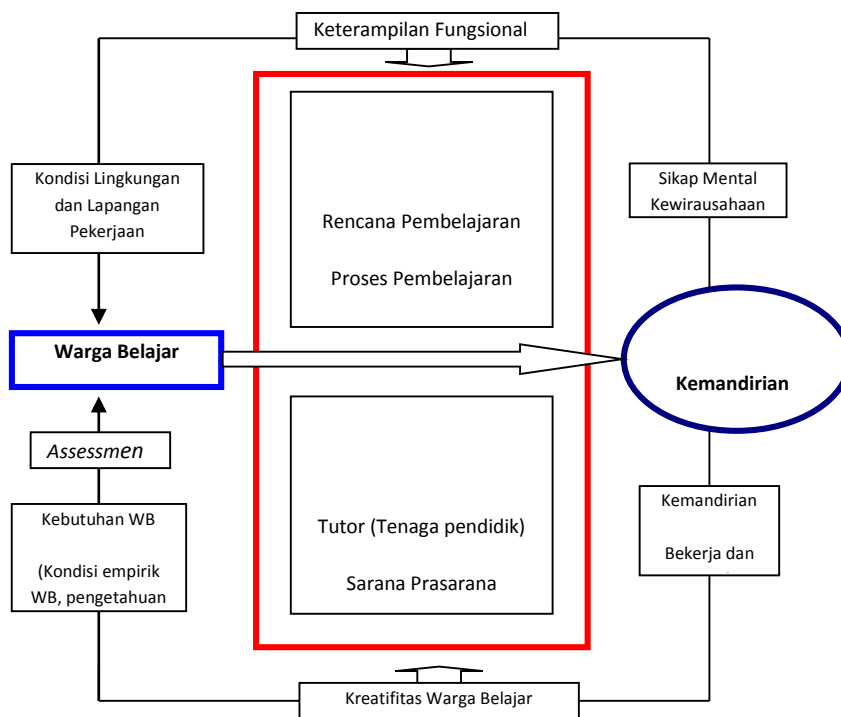


Gambar 1. Model Awal Pembelajaran Keterampilan Fungsional

Hal lain yang ditemukan adalah pemberlakuan SKS untuk pelajaran keterampilan yang bobotnya menjadi 80 menit per SKS dan penambahan materi mental kewirausahaan yang ditekankan pada pembentukan karakter dan sikap yang membentuk kemandirian serta sikap kewirausahaan warga belajar. Kendati jam belajar menjadi bertambah namun dianggap penting karena dalam model ini diperlakukan sebagai substitusi dan padanan komponen pengembangan diri

sebagaimana digariskan dalam Struktur Kurikulum SMP/MTs yang dalam Struktur Kurikulum Paket B tidak ditemukan.

Untuk mendukung keberhasilan pendidikan kesetaraan program paket B dalam rangka meningkatkan kemandirian, maka dikembangkan model konseptual pembelajaran keterampilan fungsional yang diilustrasikan dalam Gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 2. Model Konseptual Pembelajaran Keterampilan

### 3. Implementasi dan Efektivitas Model Pembelajaran Keterampilan Fungsional dalam Peningkatan Kemandirian Warga Belajar Program Paket B

Model konseptual yang disusun merupakan pengembangan pembelajaran keterampilan fungsional dari teknis vokasional ke pembentukan *character building* dan sikap kewirausahaan. Dimana karakter dan sikap wirausaha akan diposisikan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembelajaran keterampilan fungsional dalam pendidikan kesetaraan program Paket B. Masing-masing unsur yang dapat membentuk karakter dan sikap wirausaha dielaborasi

kedalam kurikulum muatan lokal dikemas kepada mata pelajaran Etika Bekerja, Ekonomi Lokal, kecakapan hidup, dan keterampilan bermatapencapaian serta keterampilan kerja.

Setiap unsur dikembangkan kedalam bahan ajar dan media pembelajaran. Salah satu cara untuk kepentingan pengembangan pembelajaran keterampilan fungsional yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan berbagai pendekatan. Antara lain mengkaji kurikulum yang berlangsung selama ini, dan mengembangkan pembelajaran keterampilan fungsional dikemas kedalam mengkombinasikan beberapa mata pelajaran yang terkait dengan pembentukan karakter dan sikap wirausaha yang dapat dikuasai dan dipahami oleh warga belajar. Proses pembelajaran program Paket B lebih menitikberatkan pengenalan permasalahan lingkungan serta cara berpikir untuk memecahkannya melalui pendekatan antar-disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dipecahkan.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif, konstruktif, serta belajar mandiri melalui penekanan pada pengenalan permasalahan lingkungan serta pencarian solusi dengan pendekatan antar keilmuan yang tidak tersekat-sekat sehingga lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan itu, sistem pembelajaran (*delivery system*) dirancang agar memiliki kekuatan tersendiri, untuk mengembangkan kecakapan komprehensif dan kompetitif yang berguna dalam peningkatan kemampuan belajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif dan konstruktif. Dengan demikian pada kompetensi lulusan program Paket B diberi catatan khusus tentang pemilikan keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, sehingga dipandang perlu harus ada upaya pengembangan dalam proses pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan karakter dan sikap berwirausaha, sesuai amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang terkait dengan substansi pembelajaran keterampilan fungsional dalam pendidikan non formal.

Dalam pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional pada program Paket B, dibatasi pada tataran substansi profil pembelajaran keterampilan

fungsional, model konseptual pengembangan pembelajaran keterampilan fungsional, dan implementasi model pembelajaran keterampilan fungsional pada PKBM Al-Salaam sebagai kelompok eksperimen dengan jumlah warga belajar sebanyak 48 orang terdiri atas laki-laki 26 orang dan perempuan berjumlah 22 orang. Kelompok ini diberi perlakuan khusus selama 1 semester tentang muatan lokal keterampilan fungsional sebagai komplemen kurikulum pendidikan kesetaraan program Paket B dengan target dapat terbangun karakter dan sikap berwirausaha. Sedangkan di PKBM Citra jumlah warga belajar 42 orang terdiri atas laki-laki 20 orang dan perempuan 22 orang sebagai kelompok kontrol. Dilihat dari jumlah sasaran terdapat perbedaan namun masih dalam batas toleransi, tapi berdasarkan karakteristik usia relatif homogen dan dilihat dari kondisi ekonomi para orang tua termasuk dalam kategori rata-rata miskin.

Dalam menguji efektivitas model, digunakan desain *quasi eksperimen* yang mempunyai kelompok kontrol walaupun tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen, karena kesulitan untuk membuat *equal* antara kelompok eksperimen dengan kontrol berhubung menyangkut perilaku manusia yang selalu dinamis sehingga sulit untuk dimanipulasi secara ketat. Strategi pengembangan yang digunakan dalam studi ini adalah *cross-sectional growth studies* dilakukan terhadap kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam waktu yang bersamaan.

Hasil uji efektivitas model yang dilakukan melalui uji hipotesis menunjukkan terdapat perbedaan kemandirian yang signifikan antara kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional. Kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model

pembelajaran keterampilan fungsional (kelompok eksperimen) untuk  $n = 48$  dan kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional (kelompok kontrol) untuk  $n = 42$ , diperoleh harga-harga statistik pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Efektivitas Model Pembelajaran

Kelompok Skor	Kelompok Eksperimen		Kelompok Kontrol	
	Rata-rata	Simpangan Baku	Rata-rata	Simpangan Baku
Pre Test	136,46	26,131	140,76	43,634
Post Test	217,88	29,740	154,24	40,182
Gain	81,42	10,198	30,21	46,750

Untuk kepentingan uji efektivitas model yang dipertimbangkan adalah skor *gain*. Hasil uji homogenitas varian menghasilkan harga F sebesar 0,810 dengan  $p = 0,371$ . Dengan demikian varian kedua kelompok tersebut homogen. Sementara itu, hasil uji perbedaan dua rata-rata menunjukkan harga  $t = 8,607$  dan harga  $p = 0,000$ . Tampak bahwa harga  $p$  jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga perbedaan tersebut secara statistik signifikan. Rata-rata kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional (eksperimen) lebih tinggi dibanding rata-rata kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional (kontrol). Jadi hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini diterima. Dari hasil uji hipotesis itu dapat diungkapkan bahwa model pembelajaran keterampilan fungsional yang dikembangkan dalam penelitian ini, secara empirik dapat meningkatkan kemandirian warga belajar.

Kemandirian warga belajar mencakup kemandirian psikologis dan sikap mental kewirausahaan. Kemandirian psikologis diartikan sebagai kesiapan dan kemampuan warga belajar untuk melepaskan diri dari ikatan emosi dengan orang dewasa lain dalam mengatur, mengurus, dan menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri dan seberapa jauh kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya melalui perbuatan atau tindakan nyata, serta



kemampuan untuk melawan/menolak tekanan atau tuntutan orang lain berdasarkan prinsip benar dan salah, atau penting dan tidak penting.

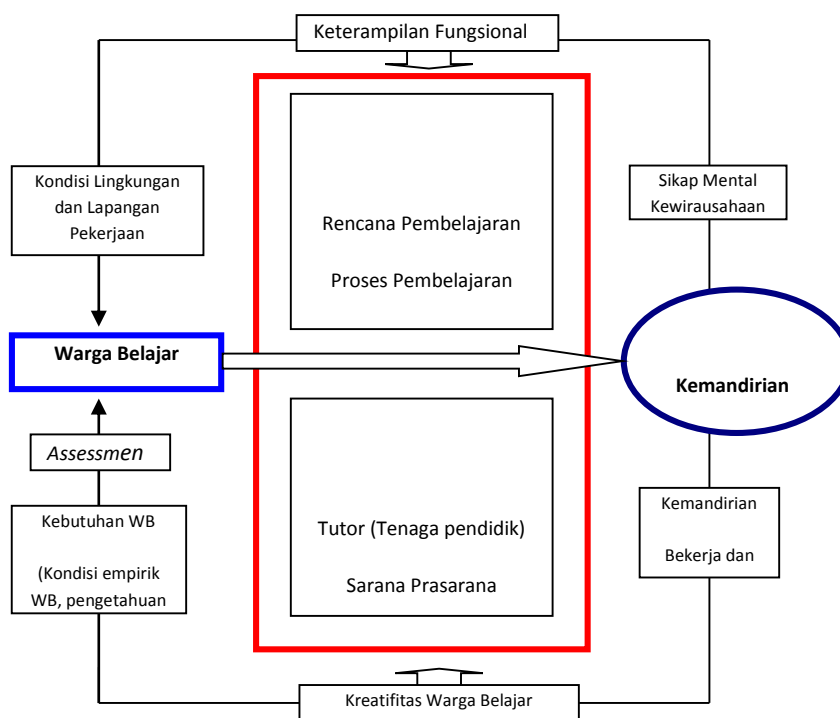
Makna kemandirian psikologis mencakup tiga aspek, yaitu kemandirian emosi (*emotional autonomy*), kemandirian bertindak atau berperilaku (*behavioral autonomy*) dan kemandirian nilai (*values autonomy*). Kemandirian emosi menunjuk pada aspek kemandirian yang berkaitan dengan kebebasan dari ketergantungan atau keterikatan hubungan emosional dengan orang dewasa lainnya. Subdimensi dan indikator kemandirian emosi sebagai berikut: (1) mampu membangun pandangan *de-idealized* terhadap orang tua/orang yang dituakan (tidak mengidealkan orang tuanya/orang yang dituakan); warga belajar tidak lagi melihat orang tua/orang yang dituakan mereka sebagai figur yang mengetahui segalanya (*all knowing*) atau menguasai segalanya (*all powerful*), (2) mampu memandang orang tua/orang dewasa lainnya sebagaimana orang biasa pada umumnya (*parents as people*); warga belajar mampu melihat (kedudukan/fungsi dan peran) dan berinteraksi dengan orang tua sebagaimana orang lain pada umumnya dan bukan hanya sebagai orang tua mereka, (3) *nondependency* (ketidaktergantungan); warga belajar memiliki tingkat kemampuan untuk lebih bersandar pada kekuatan diri sendiri daripada bergantung pada bantuan orang tua/orang dewasa lain ketika mereka mengalami ketakutan, kebingungan, atau kesedihan, dan (4) *individuated* (berdiri sendiri); warga belajar merasa berdiri sendiri dalam berhubungan dengan orang tua mereka; siswa memiliki kehidupan pribadi yang tidak selalu harus diketahui oleh orang tua/orang dewasa lainnya.

Kemandirian perilaku menunjuk pada kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan secara bebas dan menindaklanjuti sendiri keputusan keputusan tersebut tanpa terlalu bergantung pada bantuan/bimbingan orang lain. Subdimensi dan indikator dari kemandirian perilaku adalah sebagai berikut: (1) kemampuan mengambil keputusan (*decision making abilities*): warga belajar mampu berpikir hipotetis dalam membuat keputusan sendiri dan mengetahui secara tepat kapan harus meminta saran atau pendapat orang lain, (2) keteguhan terhadap pengaruh pihak lain (*conformity and susceptibility to influence*): warga belajar memiliki keteguhan dalam pendirian dan bersikap terhadap pengaruh dan

tekanan dari orang lain, dan (3) kepercayaan diri (*self-reliance*): warga belajar mampu membuat keputusan dengan mengandalkan kepercayaan pada diri mereka sendiri.

Kemandirian nilai menunjuk pada kemampuan untuk melawan/menolak tekanan-tekanan atau tuntutan-tuntutan orang lain; dalam arti, memiliki seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang penting atau tidak penting. Subdimensi dan indikatornya mencakup hal-hal berikut: (1) *abstract belief*: warga belajar memiliki keyakinan-keyakinan yang lebih jauh dan mendalam terhadap segala sesuatu, (2) *principled belief*: Warga belajar memiliki keyakinan-keyakinan yang semakin berakar pada prinsip-prinsip umum yang memiliki dasar ideologi, (3) *independent belief*: Warga belajar memiliki keyakinan-keyakinan yang tertanam atas kesadaran dan nilai-nilai yang mereka miliki sendiri tanpa pengaruh dari figur otoritas.

Berdasar kepada hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut ini digambarkan model akhir pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan Program Paket B pada Gambar 3.



Gambar 3. Model Akhir Pembelajaran Keterampilan Fungsional

## SIMPULAN

Pembelajaran keterampilan fungsional dalam pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM, dikembangkan melalui beberapa upaya. *Pertama*, Pengorganisasian pembelajaran keterampilan fungsional dikelola dalam suasana/setting kelompok. *Kedua*, Pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi antara teori (akademik) dan praktek, perpaduan pembelajaran tersebut didukung oleh variasi penggunaan dan penerapan metoda dan strategi yang sesuai dengan pembelajaran keterampilan fungsional yakni pembelajaran partisipatif, diskusi kelompok dan belajar mandiri. Untuk mendukung keberhasilan hal tersebut, maka variasi pelaksanaan pembelajaran didasarkan kepada beranekaragamnya latar belakang usia, minat, kebutuhan dan keterampilan yang dimiliki sebelumnya. *Ketiga*, Variasi pelaksanaan pembelajaran didukung oleh berbagai faktor meliputi: dana pembelajaran, sarana-prasarana (alat dan sumber pembelajaran keterampilan fungsional), kondisi tutor (kualifikasi, kompetensi), dan intensifnya pembinaan dari penilik dikmas serta tenaga lapangan dikmas (TLD). *Keempat*, Faktor eksternal pendukung penyelenggaraan pembelajaran PKBM adalah terjalinnya kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Perbankan, Dunia Usaha/Dunia Industri, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi, hal ini dilakukan untuk peningkatan produksi dan pemasaran. *Kelima*, Hasil belajar dan dampak pembelajaran yang diperoleh dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan warga belajar. Dampak program pembelajaran yang paling dirasakan oleh warga belajar adalah berupa peluang kerja bagi warga belajar.

Model konseptual pembelajaran keterampilan fungsional pendidikan kesetaraan program paket B dalam meningkatkan kemandirian warga belajar disusun berdasar kepada: landasan konseptual, landasan yuridis, dan landasan empirik. Landasan konseptual yang dijadikan pijakan dalam pengembangan model adalah konsep keterampilan fungsional (*life skills*) dan pendidikan berbasis masyarakat. Model konsep yang dikembangkan dalam implementasinya dimaksudkan untuk mendukung: *Pertama*, penguatan dalam hal; perencanaan

pembelajaran, proses pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dan penyediaan bahan ajar. *Kedua*, penguatan dalam hal; kemampuan dan kompetensi tutor yang mendukung pengembangan keterampilan fungsional, sarana-prasarana, biaya pembelajaran, model evaluasi yang ditekankan pada uji kompetensi dan dampak pembelajaran. Kedua hal ini secara terintegrasi memperhatikan kondisi warga belajar terutama, minat dan kebutuhan, kemampuan awal dan tujuan akhir dari proses pembelajaran keterampilan yakni peningkatan kemandirian warga belajar. *Ketiga*, penguatan dalam hal materi pembelajaran terutama: (a) materi yang bersifat pengantar dan konsep tentang keterampilan bermatapencaharian diajarkan dalam kelas sedangkan untuk kegiatan praktiknya langsung di lapangan atau bengkel kerja di bawah pengawasan langsung para tutor. (b) pelajaran Etika Bekerja, Ekonomi Lokal, dan Mental Kewirausahaan diajarkan di dalam kelas melalui *experiential learning*. Hanya mata pelajaran keterampilan yang esensial saja yang diberikan, sedangkan yang lainnya diharapkan dapat dipelajari oleh para warga belajar sendiri.

Hasil uji efektivitas model menunjukkan terdapat perbedaan kemandirian yang signifikan antara kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional dengan kelompok yang tidak menerapkan model pembelajaran keterampilan fungsional. Hal ini dibuktikan dengan sikap kemandirian kelompok warga belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran keterampilan fungsional. Kemandirian warga belajar hasil penelitian ini mencakup kemandirian psikologis dan sikap mental kewirausahaan. Kemandirian psikologis meliputi: kesiapan dan kemampuan warga belajar untuk melepaskan diri dari ikatan emosi dengan orang dewasa lain dalam mengatur, mengurus, dan menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri dan seberapa jauh kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya melalui perbuatan atau tindakan nyata, serta kemampuan untuk melawan/menolak tekanan atau tuntutan orang lain berdasarkan prinsip benar dan salah, atau penting dan tidak penting. Makna kemandirian psikologis dalam

penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu kemandirian emosi (*emotional autonomy*), kemandirian bertindak atau berperilaku (*behavioral autonomy*) dan kemandirian nilai (*values autonomy*).

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anwar. 2004. *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education) Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Bogdan, R. C. dan Biklen, S. K. 1982. *Qualitative Research for Education: Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Borg, W.R. dan Gall, H. 1984. *Educational Research*, New York: Pitman Publishing.
- Botskin, J. W. 1979. *No Limit to Learning*. New York: Pergamon Press.
- BPKB Jayagiri, Depdikbud. 1999. *Pelatihan Tutor Bidang Studi Paket B Terpadu dengan Pendidikan Mata Pencaharian*. Bandung: BPKB Jayagiri.
- Brembeck, C. S. 1966. *Social Foundation of Education*. New York: John Willey & Sons Inc.
- Candy, P. C. 1990. *Independent Learning: Some Ideas from Literature*. New York: Mc Graw Hill.
- Depdikbud. 1993. *Program Kejar Paket B; Pedoman Umum Pedoman Penulisan Buku Paket B; Garis-garis Besar Program Pengajaran*. Jakarta: Mahkota.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2007, *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. 2008). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, *Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Programm Paket C*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan, (2007). *Reformasi Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Kesetaraan Dirjen PNFI Depdiknas.
- Dumadezier, J. 1991. *The School and Continuing Education*. Paris: UNESCO.
- Ingalls, J. D. 1973. *A Trainers Guide to Andragogy*. Washington DC: US Department of Health Education and Welfare.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, *Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*, Jakarta
- Jarvis, P. 1985. *Paradoxess of Learning, On Becoming an Individual in Society*. San Francisco: Jossey-Publishers.
- Kamil, M. 2007. *Developing Nonformal Education through Community Learning Centre in Indonesia: Lessons from Kominkan in Japan*. Tsukuba: Center for Research on International Cooperation in Educational Development University of Tsukuba.
- Kindervatter. S. 1979. *Nonformal Education As An Empowering Process*. USA.

- Sudjana, D. 1993 *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif dalam Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Nusantara Press.
- Trisnamansyah, S. 1984. *Pengaruh Motif Berafiliasi Keterbukaan Berkomunikasi, Persepsi dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Modern Petani*. Disertasi pada FPS IKIP Bandung. Tidak dipublikasikan.
- UNESCO. 2006. *Belajar Untuk Hidup Bersama Dalam Damai Dan Harmoni*. Kantor Prinsipal UNESCO Kawasan ASIA Pasifik